

## MODEL PENGEMBANGAN DESA WISATA DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

Ahmad Azikin<sup>1</sup>, Pramono Djoko Fewidarto<sup>2</sup>

- <sup>1</sup>) Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor  
Jl. Kamper Kampus IPB Dramaga Bogor 16680
- <sup>2</sup>) Departemen Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor  
Jl. Kamper Kampus IPB Dramaga Bogor 16680  
Email: azikin@apps.ipb.ac.id

### RINGKASAN

Jumlah wisatawan asing yang berkunjung ke Kabupaten Polewali Mandar saat ini masih sedikit dan cenderung menurun setiap tahunnya. Hal tersebut menunjukkan pengembangan pariwisata di kawasan tersebut masih belum maksimal. Padahal, Polewali Mandar merupakan kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat yang potensial untuk pengembangan desa wisata. Salah satu alternatif untuk meningkatkan jumlah wisatawan adalah dengan mengembangkan desa wisata sebagai objek wisata baru. Permasalahannya adalah belum adanya model dan kebijakan pemerintah terkait desa wisata. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi potensi desa wisata, menganalisis dan menentukan lokasi desa wisata, dan merekomendasikan pola pengembangan dan pengelolaan desa wisata di Kabupaten Polewali Mandar. Metode yang digunakan, yaitu analisis statistika deskriptif, *pairwise comparison*, dan Metode Perbandingan Eksponensial (MPE). Hasil penelitian menunjukkan potensi wisata Kabupaten Polewali Mandar terdiri dari alam, budaya, pertanian, dan produk khas yang tersebar di kecamatan dan desa. Analisis penentuan lokasi desa wisata menunjukkan desa yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai desa wisata adalah Desa Panyampa di Kecamatan Campalagian. Pengembangan desa wisata tersebut dapat dilakukan dengan menghadirkan aktivitas wisata berdasarkan potensi desa, yaitu potensi alam laut dan sungai, pertanian tambak dan perkebunan kelapa, serta budaya kesenian Parrawana. Pengelolaan Desa Wisata Panyampa dilakukan oleh BUMDes Panyampa bekerja sama dengan organisasi di dalam Desa Panyampa.

**Kata kunci:** desa wisata, MPE, *pairwise comparison*, potensi desa

### ***A MODEL OF TOURISM VILLAGE DEVELOPMENT IN POLEWALI MANDAR REGENCY, PROVINCE OF WEST SULAWESI***

#### ***ABSTRACT***

*The number of foreign tourists visiting Polewali Mandar Regency is relatively small and decreases year after year. This shows that tourism development is still not optimal. In fact, Polewali Mandar is a district in*

*West Sulawesi Province that has the potential to develop a tourism village. One alternative to increase the number of tourists is to develop a tourism village as a new tourist attraction. The problem is that there is no model and government policy related to tourism villages. So, the aims of the research are to identify the potential of a tourism village, to analyze and determine the location of a tourism village, and to recommend a pattern for the development and management of a tourism village in Polewali Mandar Regency. The method used is descriptive statistical analysis, pairwise comparison, and the Exponential Comparison Method (ECM). The results of the study show that the tourism potential of Polewali Mandar Regency consists of nature, culture, agriculture, and typical products spread across sub-districts and villages. The analysis of determining the location of a tourist village shows that Panyampa Village in Campalagian District has a high potential for development as a tourist village. The tourist village can be developed by providing tourism activities based on local natural potential, such as sea and rivers, pond farming and coconut plantations, and Parrawana art culture. The management of the Panyampa Tourism Village is carried out by the Panyampa BUMDes in collaboration with organizations within Panyampa Village.*

**Keywords:** *tourism villages, ECM, pairwise comparison, village potential*

## PERNYATAAN KUNCI

Teguh dan Avenzora (2013) menjelaskan desa adalah satuan terkecil wilayah dan masyarakat dari bangsa/negara yang menunjukkan keragaman. Desa sebagai suatu wilayah memiliki fungsi rekreasi dan pariwisata yang diwujudkan melalui sumberdaya alam dan buatan yang dapat dijadikan objek wisata. Salah satu alternatif pengembangan wisata di wilayah pedesaan adalah dengan menjadikan desa sebagai desa wisata.

Kabupaten Polewali Mandar memiliki potensi wisata yang dapat dimanfaatkan dalam upaya pengembangan desa wisata. Permasalahan yang dihadapi dalam upaya tersebut adalah belum adanya model dan kebijakan terkait pengembangan desa wisata di kabupaten tersebut.

## REKOMENDASI KEBIJAKAN

Kabupaten Polewali Mandar memiliki potensi wisata berupa potensi alam, budaya, pertanian, dan produk khas. Potensi tersebut tersebar pada wilayah kecamatan dan desa yang ada di kabupaten. Desa wisata dapat dikembangkan dengan memanfaatkan potensi desa tersebut.

Rancangan kawasan perlu diterapkan dalam desa dengan melibatkan aktivitas wisata utama serta fasilitas pendukung yang dibentuk dalam suatu model. Rancangan pengelolaan diperlukan untuk menjaga keberlanjutan dari desa wisata. Pada dasarnya tata kelola desa wisata yang baik dapat ditimbulkan dengan penerapan prinsip partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas.

Partisipatif adalah pelibatan pemangku kepentingan seluas mungkin dalam pembuatan kebijakan. Pemangku kepentingan

utama dalam Desa Wisata Panyampa adalah masyarakatnya. Transparansi merupakan proses keterbukaan dalam menyampaikan aktivitas yang dilakukan sehingga pihak luar dapat mengawasi dan memperhatikan aktivitas yang ada. Transparansi dilakukan dengan dua arah yaitu transparansi BUMDes kepada pengelola di bawahnya. Akuntabilitas adalah pelaporan pada setiap kegiatan wisata dilaporkan kepada BUMDes sebagai koordinator pengelola.

## PENDAHULUAN

Pariwisata saat ini telah menjadi salah satu kebutuhan masyarakat. Nielsen (2013) menjelaskan bahwa kegiatan berwisata merupakan prioritas kedua masyarakat setelah menabung dalam mengalokasikan pendapatannya. Salah satu jenis wisata yang berkembang saat ini adalah wisata minat khusus (Ernawati, 2010). Saat ini, wisata minat khusus yang berkembang di Indonesia adalah desa wisata (Sastrayuda, 2010; Purnomo dan Nurrochmat, 2017).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 menjelaskan bahwa pengembangan desa wisata di Indonesia merupakan program pemberdayaan masyarakat dengan tujuan memberikan manfaat pariwisata kepada masyarakat melalui pengembangan desa wisata. Pengembangan desa wisata pada beberapa daerah di Indonesia belum dilakukan.

Kabupaten Polewali Mandar merupakan salah satu daerah yang belum dilakukan pengembangan desa wisata, terlihat dari belum adanya kebijakan dan *master plan* pengembangan desa wisata di kabupaten tersebut. Selain itu, jumlah wisatawan asing yang berkunjung masih sedikit dan cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun.

Yusfida (2013) menyatakan bahwa upaya peningkatan jumlah kunjungan wisatawan dapat dilakukan dengan menciptakan objek-objek wisata baru. Objek wisata baru yang potensial dikembangkan di Kabupaten Polewali Mandar adalah desa wisata dengan memanfaatkan potensi lokal. Di samping itu, masyarakat pedesaan juga dapat turut serta berpartisipasi. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar (2012) menjelaskan bahwa Kabupaten Polewali Mandar memiliki potensi keindahan alam dan keberagaman budaya. Potensi tersebut dapat dimanfaatkan dengan melakukan pengembangan desa wisata. Permasalahannya adalah di Kabupaten Polewali Mandar adalah belum adanya model pengembangan desa wisata dan belum adanya kebijakan pemerintah terkait pengembangan desa wisata di kabupaten tersebut.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk 1) mengidentifikasi potensi desa wisata di Kabupaten Polewali Mandar, 2) menganalisis dan menentukan lokasi desa

wisata di Kabupaten Polewali Mandar, dan 3) merekomendasikan pola pengembangan dan pengelolaan desa wisata di Kabupaten Polewali Mandar.

### **SITUASI TERKINI**

Kabupaten Polewali Mandar terletak di Provinsi Sulawesi barat dengan luas wilayah sebesar 2.022,30 km<sup>2</sup>. Walaupun belum memiliki model pengembangan desa wisata serta aturan pemerintah yang mendukung, Kabupaten Polewali Mandar sebagai suatu wilayah memiliki potensi wisata. Potensi tersebut di antaranya adalah potensi alam, potensi budaya, potensi pertanian dan produk khas.

Kabupaten Polewali Mandar memiliki potensi alam yang dapat dimanfaatkan untuk sektor pariwisata. Potensi tersebut terdiri dari potensi alam laut, air terjun, sungai, dan gunung yang tersebar dalam kecamatan dan desa yang ada di Polewali Mandar. Lokasi berada di daerah kawasan pesisir dengan garis pantai sehingga dapat dimanfaatkan sebagai objek wisata bahari dan kawasan ekowisata. Sungai yang mengalir di setiap kecamatan dimanfaatkan untuk pemandian alam dan kawasan ekowisata seperti Permandian Alam Limbong Sitodo, Limbong Lopi, Salu Pajaan, Permandian Alam Sarung Allo, Permandian Alam Biru, dan Kawasan Ekowisata Sungai Mapilli. Akan tetapi, potensi alam berupa gunung tidak semuanya potensial sebagai objek wisata. Hal tersebut disebabkan karena

ketinggian gunung yang kurang dan tidak memadai untuk objek wisata pendakian.

Sebagian besar masyarakat Kabupaten Polewali Mandar merupakan suku mandar, sehingga kehidupannya dipengaruhi oleh sistem adat mandar. Salah satu kebudayaan dipertahankan hingga saat ini adalah kesenian, seperti Mandar, Pakkacaping, Parrawana, Passayang-sayang, Kalindaqdaq, dan Saeyang Pattuqduq. Kesenian-kesenian tersebut diselenggarakan dalam tiap kegiatan kebudayaan yang berbeda-beda. Sementara itu produk khas yang dimiliki Kabupaten Polewali Mandar berupa kerajinan, kuliner, dan situs sejarah yang tersebar di beberapa kecamatan yang ada di kabupaten tersebut.

### **METODOLOGI**

Tahapan penelitian diawali dengan mengidentifikasi masalah berkaitan dengan pengembangan desa wisata di Kabupaten Polewali Mandar. Langkah selanjutnya adalah menentukan lokasi untuk pengembangan desa wisata. Penentuan lokasi dilakukan dengan dua tahap analisis, yaitu penentuan kecamatan potensial dan penentuan desa pada setiap kecamatan potensial.

Langkah awal penentuan lokasi adalah menetapkan kriteria untuk menentukan kecamatan potensial dan kriteria penentuan desa pada setiap kecamatan potensial. Kriteria dalam menentukan desa yang akan dijadikan desa wisata menurut Kementerian

Pariwisata (2011), yaitu memiliki potensi wisata yang dapat dimanfaatkan sebagai atraksi wisata, memiliki aksesibilitas, dan sudah memiliki aktivitas wisata atau berada dekat dengan aktivitas wisata yang sudah ada dan terkenal.

Metode yang digunakan dalam tahap ini adalah Metode Perbandingan Eksponensial (MPE). Menurut Marimin dan Maghfiroh (2010), MPE merupakan metode untuk menentukan urutan prioritas alternatif keputusan dengan kriteria majemuk. Langkah selanjutnya adalah membuat kuesioner untuk pakar dan calon wisatawan. Pakar untuk penentuan kecamatan terdiri dari tiga sumber, yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar, tokoh masyarakat bidang pariwisata, dan pelaku usaha wisata. Sementara itu pakar untuk penetapan desa terdiri dari pemerintah kecamatan dan tokoh masyarakat dalam kecamatan. Dalam tahap ini digunakan metode *pairwise comparison* untuk menentukan bobot kriteria dengan penilaian tingkat kepentingan. Hasil yang didapat adalah penentuan desa untuk pengembangan desa wisata.

Tahapan terakhir adalah melakukan observasi mendalam di desa terpilih berupa observasi pola kehidupan masyarakat, kebersihan lingkungan desa, sarana dan prasarana, potensi alam dan buatan, serta identifikasi organisasi. Setelah itu dilakukan penyusunan komponen utama dan

pendukung pengembangan desa wisata untuk merancang pola pengembangan dan pengelolaan desa wisata.

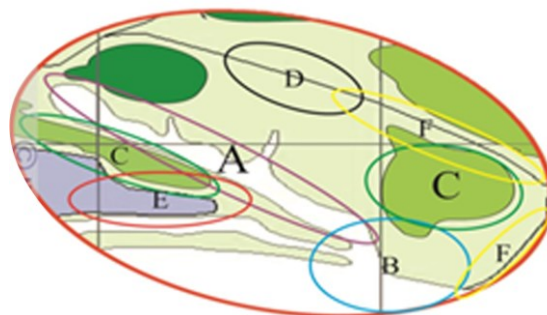
## **ANALISIS DAN ALTERNATIF SOLUSI**

Setelah melakukan wawancara oleh para pakar, hasil analisis menunjukkan bahwa kriteria dengan bobot tertinggi untuk penentuan kecamatan potensial adalah potensi keindahan alam dengan bobot terkecil yaitu kriteria kegiatan pertanian. Sementara itu kriteria dengan bobot tertinggi untuk penentuan desa potensial adalah potensi keindahan alam dengan bobot terkecil yaitu produk khas.

Berdasarkan hasil analisis kecamatan potensial, desa yang dipilih sebagai lokasi pengembangan desa wisata adalah Desa Panyampa sebagai desa prioritas pertama pada Kecamatan Campalagian. Desa Panyampa memiliki potensi yang dapat dimanfaatkan dalam pengembangan desa wisata, yaitu 1) memiliki potensi alam berupa laut dan sungai. Pantai Lurae merupakan potensi alam laut yang masih dalam proses pengembangan dan belum banyak masyarakat lokal yang mengetahui keberadaan pantai; 2) memiliki luas sawah 46 ha, area perkebunan 78 ha, dan tambak 469 ha; dan 3) sistem kehidupan masyarakat dilakukan dengan kebudayaan mandar yaitu gotong royong khas orang mandar dan kesenian rebana.

Landasan pengembangan Desa Wisata Panyampa terdiri dari kebutuhan dan dukungan calon wisatawan, kondisi fisik desa, dan peran *stakeholder* dalam pengembangan desa wisata. Selanjutnya, Hasil analisis menunjukkan pengunjung objek wisata mayoritas adalah usia remaja menuju dewasa. Karakteristik calon wisatawan meliputi kebiasaan saat melakukan kegiatan wisata. Sebagian besar calon wisatawan suka berkunjung ke tempat wisata dan kegiatan yang paling disenangi adalah menikmati keindahan alam di sekitar objek wisata.

Pengembangan Desa Panyampa sebagai desa wisata dilakukan dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki desa tersebut. Perancangan pada kawasan wisata Desa Panyampa digambarkan lebih detail pada *block plan* (Gambar 1). Perancangan kawasan wisata pada Desa Panyampa dipisahkan dengan pusat pemerintah desa agar aktivitas wisata tidak mengganggu aktivitas pemerintah desa. Indarto dan Faisal (2012) menjelaskan bahwa model dapat digunakan untuk memahami, mendeskripsikan atau memprediksi bagaimana fenomena atau realitas yang terjadi.



Gambar 2. *Block plan* Desa Wisata Penyampa

Keterangan:

Block A : Zona pengembangan wisata alam sungai

Block B : Zona pengembangan wisata alam laut

Block C : Zona pengembangan wisata perkebunan kelapa masyarakat

Block E : Zona pengembangan wisata tambak

Block D : Lahan kosong yang dapat dijadikan sebagai area parkir utama dan pembangunan toko souvenir

Block E : Area tambak yang dapat dijadikan area pembangunan tempat makan

Block F : Area pemukiman masyarakat yang dapat dijadikan *homestay* dan edukasi alat musik rebana

### Rencana Aktivitas Wisata Utama

Aktivitas wisata utama dalam Desa Wisata Panyampa terdiri dari wisata alam sungai, wisata alam laut, wisata pertanian, dan wisata budaya dengan perkiraan luas sebagai berikut:

1. Zona pengembangan wisata alam sungai pada Block A dimanfaatkan dengan membuat permainan perahu mengelilingi sungai  $\pm 177,2 \text{ m}^2$
2. Zona pengembangan wisata alam laut pada Block B terdiri dari Pantai Lurac

dan permainan *banana boat*. Zona pengembangan tersebut dibuat dengan memanfaatkan panjang garis pantai  $\pm 950$ m

3. Zona pengembangan wisata pertanian memanfaatkan lahan perkebunan kelapa (Block C) dan tambak (Block E) milik masyarakat Desa Panyampa. Lahan perkebunan kelapa dimanfaatkan sebagai area permainan *airsoft gun* dengan perkiraan luas  $\pm 300$  m<sup>2</sup>. Tambak dimanfaatkan untuk wisata edukasi budidaya sesuai komoditi yang ada dan dapat dimanfaatkan untuk membuat area pemancingan dengan luas  $\pm 150$  m<sup>2</sup>.
4. Zona pengembangan wisata budaya berupa edukasi kesenian Parrawana yaitu cara memainkan alat musik rebana khas mandar. Zona pengembangan 25 wisata budaya memanfaatkan rumah milik ketua Kelompok Kesenian Panyampa sehingga luas area disesuaikan dengan luas lahan rumah ketua tersebut.

### **Fasilitas Pendukung Desa Wisata Panyampa**

Fasilitas pendukung dibuat untuk mendukung keberadaan objek wisata utama. Fasilitas pendukung Desa Wisata Panyampa terdiri dari area parkir utama, toko souvenir, tempat makan, dan *homestay* dengan perkiraan luas sebagai berikut:

1. Area parkir dibuat dengan memanfaatkan lahan kosong pada Block D. perkiraan luas lahan untuk area parkir

$\pm 751,4$  m<sup>2</sup> dengan panjang  $\pm 44,2$  m dan lebar  $\pm 17$  m. Pembangunan toko *souvenir* dilakukan dengan memanfaatkan lahan kosong pada Block D. Toko souvenir digunakan sebagai tempat penjualan cinderamata dan oleh-oleh. Perkiraan luas bangunan toko *souvenir*  $\pm 128$  m<sup>3</sup> dengan panjang  $\pm 8$  m, lebar  $\pm 4$  m, dan tinggi  $\pm 4$  m sehingga luas lahan yang diperlukan  $\pm 32$  m<sup>2</sup> (sesuai dengan panjang dan lebar bangunan).

2. Pembuatan tempat makan dilakukan dengan memanfaatkan lahan di sekitar area tambak (Block E). Perkiraan luas area tempat makan  $\pm 225$  m<sup>2</sup> dengan panjang dan lebar masing-masing  $\pm 15$  m.
3. Penyediaan *homestay* untuk pengunjung dilakukan dengan memanfaatkan rumah masyarakat (Block F) sehingga luas area untuk *homestay* disesuaikan dengan luas lahan pada rumah masyarakat.

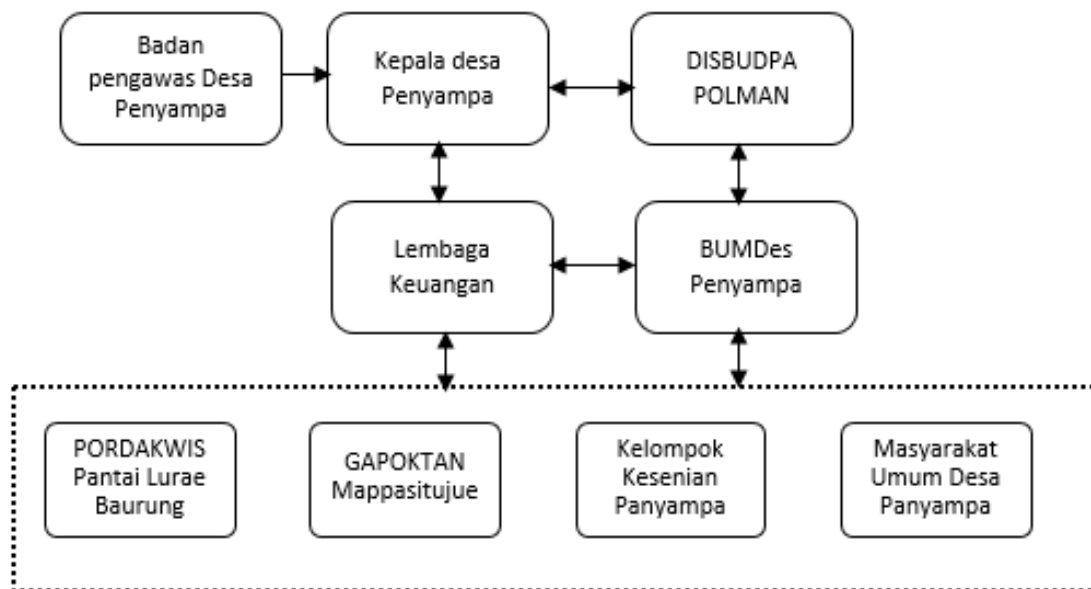
Raharjana (2010) menjelaskan bahwa pengembangan desa wisata dilakukan dengan menerapkan pendekatan *community-based tourism*. Peran *stakeholder* dalam pengembangan desa wisata di Desa Panyampa merupakan peran yang sangat penting. *Stakeholder* tersebut termasuk masyarakat Desa Panyampa (Kelompok Sadar Wisata (PORDAKWIS) Pantai Lurac Baurung, kelompok kesenian Panyampa, Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) Mappasitujue, Karang Taruna Desa Panyampa, kelompok nelayan, dan kelompok ibu PKK

(Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga), Badan Usaha Milik Desa Panyampa (BUMDes Panyampa), Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar (DISBUDPAR POLMAN), dan Lembaga Keuangan. Kelembagaan pengelolaan pemerintah desa dalam pengelolaan desa wisata diwakili perannya oleh Badan Usaha Milik Desa Panyampa (BUMDes Panyampa). BUMDes Panyampa berperan sebagai koordinator dalam Desa Wisata Panyampa. BUMDes Panyampa berada di bawah pengawasan Kepala Desa Panyampa dan Badan Pengawas Desa Panyampa (BPD Panyampa) dalam melakukan aktivitas pengelolaan.

BUMDes Panyampa dapat melibatkan beberapa kelompok masyarakat Desa Panyampa untuk mengelola aktivitas wisata

utama dan pendukung dalam Desa Wisata Panyampa, yaitu Kelompok Sadar Wisata (PORDAKWIS) Pantai Luræ Baurung, kelompok kesenian Panyampa, Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) Mappasitujue, Karang Taruna Desa Panyampa, kelompok nelayan, dan kelompok ibu PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga).

BUMDes dapat bekerja sama dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar sebagai pihak pemerintah (DISBUDPAR POLMAN). Selain itu BUMDes Panyampa dapat bekerja sama dengan lembaga keuangan dalam hal pengadaan modal untuk pengembangan Desa Wisata Panyampa. Skema pengelolaan dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Skema pengelolaan Desa Wisata Panyampa

Secara detail, rancangan aktivitas kelembagaan dapat dibagi dalam aktivitas

wisata utama dan fasilitas pendukung yang tersaji pada Tabel 1 dan Tabel 2.



Tabel 1. Rancangan penyediaan alat dan sarana penunjang untuk objek wisata

Kegiatan	Penyedia	Pengelola	Partner
Penyedia alat permainan <i>banana boat</i>	BUMDes Panyampa	PORDAKWIS Pantai Lurae Baurung	Lembaga keuangan dan DISBUDPAR POLMAN
Penyedia alat permainan <i>shot gun</i>	BUMDes Panyampa	GAPOKTAN Mappasitujue	Lembaga keuangan dan DISBUDPAR POLMAN
Penyediaan sarana Gazebo di setiap objek wisata utama	BUMDes Panyampa	Pengelola setiap objek wisata	Karang Taruna
Penyedia perahu	Karang Taruna	PORDAKWIS Pantai Lurae Baurung	Kelompok Nelayan
Penyedia alat musik rebana	Kelompok Kesenian Panyampa	Kelompok kesenian Panyampa	BUMDes Panyampa
Penyedia tempat edukasi alat musik rebana	BUMDes Panyampa	Kelompok kesenian Panyampa	Lembaga keuangan
Penyedia bahan bakar untuk perahu	BUMDes Panyampa	Kelompok ibu PKK	BUMDes Panyampa

Tabel 2. Rancangan penyediaan fasilitas pendukung desa wisata

Kegiatan	Penyedia	Pengelola	Partner
Penyediaan home stay	Masyarakat	Masyarakat	BUMDes Panyampa dan Lembaga keuangan
Penyediaan tempat makan	BUMDes Panyampa	Kelompok ibu PKK	Lembaga Keuangan
Penyediaan toko souvenir	BUMDes Panyampa	Kelompok ibu PKK	
Penyediaan tempat parkir	BUMDes Panyampa	Karang Taruna	

### Pengelolaan Aktivitas Wisata Utama

Aktivitas wisata utama Desa Wisata Panyampa terdiri dari wisata alam, pertanian, dan budaya. Pengelola wisata alam adalah PORDAKWIS Pantai Lurae Baurung. GAPOKTAN Mappasitujue bertanggung jawab untuk mengelola objek wisata pertanian. Penanggung jawab untuk mengelola objek wisata budaya adalah Kelompok Kesenian Panyampa. Implikasi manajerial dalam penelitian Model Pengembangan Desa Wisata Kabupaten Polewali Mandar

Provinsi Sulawesi Barat, yaitu: 1) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Panyampa melakukan sosialisasi kepada masyarakat Desa Panyampa terkait rencana pengembangan Desa Panyampa sebagai desa wisata dengan menjelaskan manfaat desa wisata bagi masyarakat dan mengajak masyarakat, pemuda, dan tokoh seniman dalam desa untuk berpartisipasi; 2) Kepala desa dan BUMDes Panyampa mengajak masyarakat untuk berbudaya bersih dan rapi serta menata lingkungan agar asri, nyaman,

dan indah; 3) menghubungi pihak-pihak terkait dan pakar perancang wisata untuk terlibat dalam perancangan kawasan Desa Wisata Panyampa; 4) berkoordinasi dengan Bupati dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar atau instansi terkait lainnya untuk memohon dukungan dalam pengembangan Desa Wisata Panyampa; serta 5) berkoordinasi dengan agen-agen wisata dan persatuan hotel dan restoran untuk menyampaikan rencana pengembangan Desa Wisata Panyampa dalam rangka promosi awal.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [DISBUDPAR] Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar. 2012. Laporan Akhir Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012.
- Ernawati, N.M. 2010. Tingkat kesiapan Desa Tihingan-Klungkung Bali sebagai tempat wisata berbasis masyarakat. *Jurnal Analisis Pariwisata*, 10(1), 1-8.
- Indarto, Faisal, A. 2012. *Konsep Dasar Analisis Spasial*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- [KEMENPAR] Kementerian Pariwisata. 2016. Statistik Profil Wisatawan Nusantara 2016. Kementerian Pariwisata.
- Marimin, Maghfiroh, N. 2010. *Aplikasi Teknik Pengambilan Keputusan dalam Manajemen Rantai Pasok*. Bogor: IPB Press.
- Nielsen. 2013. Consumer confidence concerns and spending intentions around the world. <http://www.nielsen.com/id/en.html> [12 Des 2017].
- Purnomo, R., Nurrochmat, D.R. 2017. Kebijakan pemanfaatan lahan melalui skema PHBM di Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. *Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan*, 3(1), 52-67. <https://doi/10.20957/jkebijakan.v3i1.15236>.
- Raharjana, D.T. 2010. Membangun pariwisata bersama rakyat kajian partisipasi lokal dalam membangun desa wisata di Dieng Plateau. *Jurnal Kawistara*, 3(2), 225-328.
- Sastrayuda, G.S. 2010. Konsep Pengembangan Desa Wisata: Concept *Resort and Leisure*, Strategi Pengembangan dan Pengelolaan *Resort and Leisure*.
- Yusfida, I. 2013. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Wisatawan Mancanegara Berwisata ke 15 Destinasi Pariwisata Indonesia. *Tesis*, tidak dipublikasikan. ITB.
- Teguh, F., Avenzora, R. 2013. *Ekowisata Dan Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan Di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia.